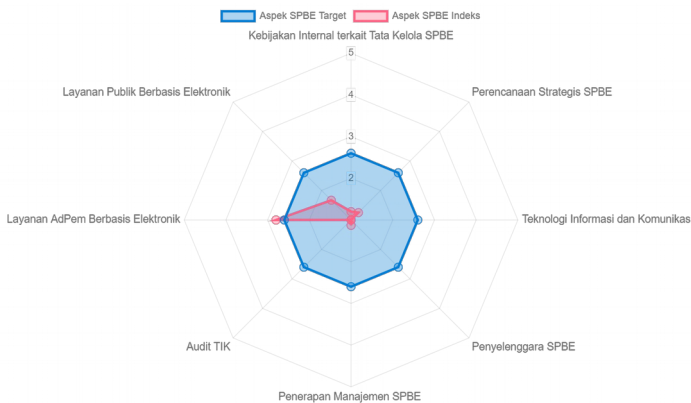


Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks		Nilai
	Nama Indeks		Nilai
	SPBE		1,68
	Domain Kebijakan SPBE		1,20
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		1,20
	Domain Tata Kelola SPBE		1,10
	Perencanaan Strategis SPBE		1,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi		1,00
	Penyelenggara SPBE		1,00
	Domain Manajemen SPBE		1,09
	Penerapan Manajemen SPBE		1,13
	Audit TIK		1,00
	Domain Layanan SPBE		2,35
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		2,80
	Layanan Publik Berbasis Elektronik		1,67



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah..

- **Kekuatan**
Belum memiliki kekuatan pada Aspek ini di ruang lingkup Internal Pemkab Sumba Barat
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih belum memiliki Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah memiliki Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah namun kebijakan belum mencakup untuk keseluruhan perangkat daerah.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perancangan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat hanya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Belum memiliki kekuatan pada Aspek ini di ruang lingkup Internal Pemkab Sumba Barat
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dimana tidak